

Gagasan Kebangsaan Nadjamoeddin Daeng Malewa Dalam Memajukan Perekonomian Bumiputera Pada Awal Abad 20 di Sulawesi Selatan

St. Junaeda

Universitas Negeri Makassar
E-mail: st.junaeda@unm.ac.id

Article History:

Received: 19 Maret 2024

Revised: 28 Maret 2024

Accepted: 31 Maret 2024

Keywords: *Ideas of Nationality, Economy, Bumiputera, South Sulawesi.*

Abstract: *This research aims to find out Nadjamoeddin Daeng Malewa's ideas related to the development of a people's economy for native people in the Dutch East Indies, especially in South Sulawesi. Apart from having ideas about advancing the economy, Nadjamoeddin has three important ideas about nationality, namely unity, advancing education and advancing the people's economy. This research is historical research that uses historical sources in the form of archives and contemporary newspapers, both those published in Java and those published outside Java such as in Makassar. These sources are cross-checked to obtain valid data, known as source criticism. The results of the research show that the idea of advancing the economy initiated by Nadjamoeddin was carried out by initiating the formation of 54 cooperative villages in Surabaya, forming the Bank Pasar cooperative and becoming chairman of the Minasa Badji cooperative which was founded in Makassar at the end of 1939. All of these things were done by Nadjamoeddin This aims to create a middle class for the native people in the Dutch East Indies.*

PENDAHULUAN

Dalam khasanah perkembangan historiografi Indonesia, biografi politik telah banyak dituliskan dan mengambil peran dalam konteks kepahlawanan. Faktor kepahlawanan (*heroisme*) seringkali menjadi perhatian khusus dalam penulisan biografi politik seorang tokoh (Kuntowijoyo, 2003), sehingga sangat memungkinkan munculnya keberpihakan dari penulis sejarah dalam mendeskripsikan tokoh yang dimaksud. Seluruh perjalanan hidup sang tokoh akan selalu dihubungkan dengan perilaku baik dan buruk. Perilaku yang cenderung dianggap buruk akan sedemikian rupa diolah untuk menampilkan sang tokoh tetap sebagai “orang baik” dalam konteks kekinian.

Tidak jarang biografi yang dihasilkan hanya berisi tentang hal-hal baik dari sang tokoh yang dihadirkan dalam narasi sejarah yang hampir tanpa cacat. Ketika seorang tokoh dimasa hidupnya pernah memilih jalan yang berbeda dengan kebanyakan dan atau melakukan hal yang keliru, apakah itu kemudian tidak menjadi bagian dari sejarah hidupnya?. Ini adalah pertanyaan refleksi atas hadirnya biografi tokoh yang hampir selalu dihadirkan dengan wajah yang baik.

Setiap manusia dalam masa hidupnya sangat lumrah pernah melakukan hal yang dianggap baik maupun yang dianggap buruk pada masanya. baik dan buruk perilaku seorang tokoh adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah perjalanan hidupnya. Biografi seorang tokoh seharusnya di narasikan dalam porsi yang seimbang sehingga menghasilkan sejarah yang manusiawi, oleh karena sejarah sebagai realitas objektif masa lalu. Sebagai realitas objektif masa lalu, maka isinya adalah tentang perilaku dan tindakan yang sangat manusiawi dan bukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sang tokoh secara normativ (Bambang Purwanto, 2006).

Nadjamoeddin Daeng Malewa adalah seorang tokoh penggagas kebangsaan di Sulawesi Selatan pada awal abad 20. Ketika pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945, Nadjamoeddin secara sadar menyetujui usulan Van Mook untuk membentuk Negara federal yaitu Negara Indonesia Timur (Arsip Secretariat Denpasar-Confrentie uitgave No.9 dan 42; Yong Mun Cheong, 1982). Pilihan politik inilah yang menjadi bumerang bagi dirinya karena menjadi pihan politik yang berseberangan dengan pilihan kebanyakan tokoh pergerakan pada umumnya. Sosoknya seringkali dinarasikan sebagai tokoh yang kontroversial atau bahkan dianggap sebagai antek Pemerintah Kolonial Belanda, pecundang, oportunistis dan bahkan sebagai penghianat bagi kelompok pergerakan. Pilihan politik Nadjamoeddin saat itu berseberangan dengan tokoh pergerakan kebanyakan. Pilihan politik tentang arah dan masa depan Bangsa Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Selatan pada khususnya. Ketika mayoritas tokoh pergerakan nasional mengusung ideology kesatuan bagi masa depan Bangsa Indonesia, Nadjamoeddin memilih jalan yang berbeda yaitu mendukung bentuk Negara federal bahkan bersama dengan Van Mook turut menggagas lahirnya Negara Indonesia yang federal. Pilihan politik inilah yang dianggap salah saat itu, sehingga dalam historiografi Indonesia, kehadiran Nadjamoeddin dalam narasi sejarah seringkali dihadirkan sebagai seorang tokoh yang pecundang karena memilih berkolaborasi dengan pihak penjajah dalam hal ini direpresentasikan oleh tokoh Van Mook sebagai inisiator terbentuknya Negara federal.

Terlepas dari pro dan kontra atas sosoknya, Nadjamoeddin tetaplah sebagai salah satu tokoh Sulawesi Selatan yang telah banyak melakukan perubahan penting bagi masyarakat Sulawesi Selatan pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Perubahan penting yang telah dilakukan Nadjamoeddin daeng Malewa dapat ditelusuri dari sejumlah pidato-pidato yang telah disampaikan di banyak tempat ketika melakukan kunjungan-kunjungan baik di Jawa maupun di Sulawesi Selatan. Dalam pidatonya, berbagai gagasan dan ide tentang keinginannya untuk melakukan perubahan bagi masyarakat Sulawesi Selatan sangat tampak ketika menjelaskan tentang sikap penjajah yang tidak akan pernah mengakui bahwa Negara yang sedang dikoloni telah matang dan mampu berdiri sebagai bangsa dan Negara yang berdaulat. Pada konteks ini, kita bisa melihat bahwa dugaan tentang keberpihakan Nadjamoeddin dengan Pemerintah Kolonial Belanda sebagai pihak penjajah ternyata tidak sepenuhnya benar. Hal ini terlihat dari kritik keras yang disampaikan olehnya pada beberapa pidato yang disampaikan. Lebih lanjut, Nadjamoeddin menyampaikan bahwa pihak penjajah akan selalu mengatakan bahwa Negara koloni masih membutuhkan bimbingan untuk mencapai kesiapan menjadi sebuah bangsa dan Negara yang berdaulat (Kementerian Penerangan RI, 1953: 81).

Tulisan ini tidak ingin terjebak dalam konteks perdebatan apakah Nadjamoeddin seorang pecundang atau seorang pahlawan. Tidak juga untuk membuktikan bahwa narasi sejarah Nadjamoeddin dalam historiografi Indonesia yang seringkali diposisikan sebagai orang yang berpihak pada pemerintah Kolonial atau label penghianat itu tidak benar. Tulisan ini hendak menarasikan tentang gagasan Nadjamoeddin Daeng Malewa tentang kebangsaan Indonesia khususnya kebangsaan Sulawesi Selatan yang masih jarang dituliskan atau bahkan belum ada

tulisan yang benar-benar fokus pada gagsanya tentang pengembangan perekonomian rakyat bumiputera. Menurutnya, untuk membangun sebuah bangsa yang besar, harus memiliki tiga pilar yang kuat yaitu Persatuan Suku Bangsa, penyelenggaraan pendidikan yang merata, dan Ekonomi Kerakyatan (Barisan Kita, No.1, Maret 1931, halaman 1). Secara khusus, tulisan ini akan menarasikan tentang gagasan Nadjamoeddin tentang ekonomi kerakyatan. Ide dan gagasan Nadjamoeddin tentang membangun ekonomi kerakyatan bumiputera masih jarang dihadirkan dalam historiografi Indonesia. Menurutnya, ketika kesadaran berbangsa telah terwujud, maka bangunan ekonomi bumiputera menjadi bagian yang sangat penting. Tanpa sistem ekonomi yang stabil, maka bangsa tersebut tidak akan pernah menjadi besar. Bagi Nadjamoeddin Daeng Malewa, sistem ekonomi yang tepat adalah, sistem ekonomi yang bersandar pada kemampuan serta kemandirian sebuah bangsa sesuai dengan keahlian serta keterikatannya pada bisang yang telah tersedia disekeliling masyarakat.

Bagi Nadjamoeddin daeng Malewa, sistem ekonomi yang ingin dimajukan untuk masyarakat Sulawesi Selatan adalah membangun jejaring dan peningkatan potensi kelautan sebagai potensi diri dan potensi alam yang telah membesarkan masyarakat Sulawesi Selatan. Dengan bangunan model ekonomi seperti ini, maka model kemapanan sistem ekonomi bukanlah sebuah angan-angan, melainkan sebuah keniscayaan yang mampu direalisasikan. Konsep inilah yang dimaksud oleh Nadjamoeddin daeng Malewa sebagai sebuah sistem ekonomi yang berbasis pada rakyat dan sepenuhnya kembali pada rakyat pula (Pemberita Makassar, Sabtu 24 Mei 1941).

Bagaimana bentuk praksis dari sistem perekonomian kerakyatan yang ditawarkan oleh Nadjamoeddin daeng Malewa, inilah yang menjadi fokus dari tulisan ini. Nadjamoeddin memiliki beberapa gagasan tentang pengembangan perekonomian kerakyatan. Gagasan peningkatan perekonomian kerakyatan tidak hanya bagi Masyarakat di Sulawesi Selatan, tetapi juga di Jawa. Salah satu yang pernah diperjuangkan Nadjamoeddin adalah membentuk Rukun Pelayaran Indonesia (ROPELIN). ROPELIN ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing perekonomian bumiputera dengan memajukan dunia pelayaran (H.W. Dick, 1990). Tulisan ini tidak akan membahas tentang ROPELIN tetapi akan fokus pada gagasan pengembangan ekonomi kerakyatan khususnya bagi masyarakat Sulawesi Selatan dengan menginisiasi pembentukan koperasi. Gagasan tentang koperasi tentu saja menjadi hal yang masih asing dan baru bagi masyarakat Sulawesi Selatan di awal abad 20. Tentu saja akan sangat berbeda jika gagasan itu muncul disaat sekarang, akan menjadi hal yang sangat biasa saja, tetapi akan berbeda karena gagasan ini muncul di awal abad 20

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian sejarah. Merekonstruksi sebuah peristiwa sejarah yang peristiwanya sudah berlalu bahkan jaraknya yang sudah sangat jauh tentulah bukan perkara mudah. Penelitian sejarah sangat tergantung dari ketersediaan sumber. Meskipun sebuah topik sedemikian menarik, tetapi jika tersedia data maka tulisan tersebut tidak bisa dilakukan. Penulis menelusuri sumber di beberapa tempat. Beberapa Koran yang terbit diawal abad 20 seperti Barisan Kita, Sin Tit Po, Pemberita Makassar dan Koran lainnya berhasil penulis dapatkan di koleksi Perpustakaan Nasional di Jakarta. Berikutnya penulis juga mendapatkan Koran Indonesia Timoer yang terbit di Makassar bisa didapatkan penulis di Kantor Arsip Makassar. Bukan perkara mudah untuk mendapatkan sumber tersebut, selain kertasnya sudah rapuh, juga beberapa Koran-koran ini belum semuanya dibuatkan soft filenya di Perpustakaan Nasional ketika peneliti sedang mengumpulkan sumber. Sumber data berupa keterangan atau kesaksian dari keluarga atau kerabat sang tokoh, penulis tidak dapatkan. Penulis mengalami kesulitan dalam menelusuri keberadaan keluarga Nadjamoeddin. Sumber tertulis berupa majalah, Koran dan arsip yang

ditemukan baik di kantor Arsip Jakarta maupun di Makassar menjadi sumber utama dalam penulisan artikel ini. Salah satu sumber yang sangat membantu penulis adalah kumpulan pidato-pidato Nadjamoeddin yang dimuat secara bersambung dalam Koran-koran yang disebutkan di atas.

Sumber-sumber yang telah didapatkan kemudian dikroscek dengan sumber lain yang sejamin. Selain Koran, majalah dan arsip, penulis juga menggunakan literatur lain sebagai pembanding. Penulis menelusuri beberapa buku referensi, majalah lokal, tesis, jurnal dan disertasi sebagai pembanding untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan. Pemilahan dan juga penilaian terhadap sumber ini sangat penting terkait dengan layak atau tidaknya sumber tersebut digunakan untuk membangun basis argumentasi dalam penulisan artikel ini. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan sumber yang valid atau dikenal dengan istilah kritik sumber. Hingga pada prosesnya ketika beberapa sumber sudah saling dikroscek, penulis melakukan rekonstruksi. Rekonstruksi dilakukan dengan cara menguraikan atau mendeskripsikan berbagai informasi yang diperoleh dengan cara analitis. Dengan demikian, tulisan ini adalah hasil rekonstruksi peristiwa yang dilakukan penulis dalam mendeskripsikan dan menganalisa gagasan Nadjamoeddin dalam mengembangkan ekonomi bumiputera secara khusus lewat pembentukan koperasi di Sulawesi Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Memberantas Lintah Darat

Visi pengembangan ekonomi Nadjamoeddin mulai diperjuangkan dengan bergabung masuk di Partai Indonesia Raya (Parindra). Selain menggagas terbentuknya Rukun Pelayaran Indonesia (Roepelin), Nadjamoeddin juga menggagas terbentuknya koperasi. Bersama dengan pengurus lain di Parindra, Nadjamoeddin menginisiasi dilaksanakannya pertemuan terkait dengan kondisi dan fenomena perekonomian masyarakat khususnya di Surabaya saat itu. Muncul fenomena yang sangat merugikan masyarakat dengan adanya dan bahkan semakin maraknya lintah darat (*woekerbertrijng*).

Fenomena lintah darat sebenarnya bukan sesuatu yang baru muncul, pemerintah Kolonial Belanda juga sudah menyadarinya sejak awal. Pemerintah Kolonial Belanda sudah berusaha mengantisipasi masalah lintah darat dengan mengeluarkan *woerkerbesluit* yaitu sebuah undang-undang yang telah dimuat dalam *Staatsblad* tahun 1916 No.643. Undang-undang ini secara khusus bertujuan untuk memerangi atau menghilangkan kehadiran lintah darat. Pemerintah Kolonial sedemikian rupa sudah mengatur mekanisme pengaturan ketika pihak pemberi utang mengambil keuntungan yang sangat tinggi atas pihak lainnya dengan memanfaatkan ketidaktahuan atau kebodohan atas pihak yang meminjam. Dalam konteks seperti ini, pemerintah Kolonial Belanda telah memberikan kewenangan dan kuasa penuh kepada hakim untuk menjadi pihak penengah dengan menghapuskan perjanjian tersebut dan menggantikannya dengan perjanjian baru. Hanya saja pelaksanaan dari aturan ini tidak bisa maksimal. Beberapa kondisi yang menjadi penyebabnya adalah bahwa seringkali hakim memiliki pandangan yang berbeda dalam menganalisis kasus-kasus. Sangat mungkin bahwa hakim satu akan melihat bahwa isi perjanjian antara kedua pihak sangat merugikan pihak lain, tetapi hakim lain bisa saja melihat isi perjanjian tersebut pada dasarnya sudah saling menguntungkan keduanya (Sin Tit Po, Kamis 6 Pebruari 1936). Kondisi lainnya adalah bahwa tidak semua pihak-pihak yang merasa dirugikan atas pinjaman tersebut berani melaporkan kepada pihak pemerintah karena keterbatasan akses dan informasi.

Dengan tidak maksimalnya penerapan dari peraturan ini, pihak Pemerintah Kolonial

Belanda segera mengambil kebijakan atas maraknya fenomena lintah darat dan juga berdasarkan dari laporan-laporan yang diterimanya. Dari laporan yang diterima, mendapatkan masukan untuk segera membuat peraturan baru. Pemerintah Kolonial Belanda mengabulkan permohonan tersebut dengan membentuk sebuah komisi di tahun 1929. Komisi ini diberikan tugas untuk merevisi peraturan lama. Sayangnya, hingga tahun 1936 komisi yang telah dibentuk ini gagal menghasilkan peraturan baru sebagai pengganti peraturan lama. Penulis tidak mendapatkan data terkait penyebab gagalnya dari komisi ini, entah karena praktek ini sudah sedemikian parah terjadi atau karena beberapa kondisi yang dihadapi oleh komisi sehingga tidak memungkinkan lahirnya peraturan baru. Fenomena lintah darat ini terjadi di hampir semua kota di Hindia Belanda. Hal ini juga disampaikan pada laporan Mr. Hart, *Directeur Oeroesan Economie* yang dimuat pada beberapa Koran. (*Soerabaiasch Handelsblad, Terugblijk*, 1935; *Sin Tit Po*, 16 Januari 1936).

Lintah darat ini tidak terbatas hanya pada satu etnis atau kelompok masyarakat tertentu. Salah satu kelompok lintah darat yang paling terkenal adalah lintah darat dari etnis Tionghoa yang sangat terkenal dengan istilah Tjina Mindring. Selain dari etnis Tionghoa, juga ada lintah dasat dari kelompok oang Arab yang dikenal dengan Arab Mindring. Selain Tjina Mindring dan Arab Mindring, masih ada lagi kelompok linah darat lainnya yaitu dari kelompok orang Eropa dan bahkan lintah darat dari orang bumiputera sendiri.

Pada dasarnya sebagian orang akan mengatakan bahwa relasi yang terbangun antara pihak yang memberikan pinjaman dan yang menganbil pinjaman adalah relasi yang saling menguntungkan. Pihak peminjam diberikan kemudahan bisa mendapatkan pinjaman dengan cara yang sangat mudah. Beberapa peminjam bahkan memberikan kemudahan dengan cara tidak mewajibkan adanya jaminan. Lintah darat memberikan mekanisme pinjaman dengan cara yang tidak berbelit-belit dan bisa diperoleh dengan sangat cepat. Tentu saja kemudahan-kemudahan yang diberikan ini juga disebabkan oleh persaingan antar lintah darat dalam mendapatkan hati konsumennya. Besaran bunga atas pinjaman tersebut bervariasi. Paling rendah adalah 60% dan yang tertinggi adalah 120% pertahun. Tinggi rendahnya bunga ini tentu berdasar dari beberapa pertimbangan, misalnya tingkat kemampuan pihak peminjam untuk melakukan negosiasi. Mekanisme pembayaran utang dilakukan mirip dengan pembayaran pinjaman di bank. Lintah darat menentukan jumlah cicilan yang harus dibayarkan peminjam setiap bulan. Dalam salah satu pidato Mr. Susanto Tirto Prodjo dalam rapat umum Parindra menyampaikan sebagai berikut:

Itoelah bermatjem-matjem adanja. Ada jang sampe 100 pCt., ada lagi jang 120 pCt. Seperti pintjem f 50,- kembali f 75,- ditjitjil seboelan f 15,- sampe 5 boelan; berarti rente 50 pCt. Di dalam 5 boelan = 120 pCt. Setaon. Tetapi oemoemnja, d.w.z. jang kebanyakan tarief woekaraars itoe; pinjem f 100,- kembali f 150,- citjitjil 10 boelan f 15,- djadi rentenja 51 pCt. Dalem 10 boelan = 60 pCt . setaon. (*Sin Tit Po*, Kemis 6 Pebruari 1936).

Kondisi-kondisi seperti ini sangat umum terjadi dalam masyarakat dan menarik perhatian Nadjamoeddin. Bersama dengan rekan-rekannya dalam kelompok pergerakan memikirkan jalan keluar atas masalah yang dihadapi sebagian besar masyarakat khususnya masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Ketidakmampuan pemerintah Kolonial Hindia Belanda dalam menyelesaikan dan atau menghilangkan kelompok-kelompok lintah arat ini memaksa Nadjamoeddin berpikir keras untuk menciptakan perekonomian masyarakat yang lebih sehat dan lebih baik. Lewat Parindra, Nadjamoeddin menggagas dibentuknya koperasi dengan suatu harapan bisa memperbaiki perekonomian khususnya perekonomian bumiputera sebagai kelompok yang paling dominan berada dalam kemiskinan.

2. Merintis Pembentukan Kampung-Kampung Koperasi

Koperasi menjadi salah satu pilihan bagi Nadjamoeddin untuk menjauhkan masyarakat

dari para lintah darat. Diawali dengan memilih beberapa lokasi atau kampung-kampung yang akan dibina menjadi kampung koperasi. Kampung-kampung tersebut dibina dan dikontrol oleh Nadjamoeddin dibawah pengawasannya. Prestasi yang dicapai adalah mampu membentuk sejumlah 54 kampung koperasi di Surabaya. Tidak diperoleh data bagaimana kelanjutan dan perkembangan dari kampung koperasi ini. Sebelum dibentuk kampung koperasi, di Jawa Timur sebenarnya sudah ada kebiasaan dari masyarakat setempat yang sering dilakukan secara bersama-sama. Masyarakat yang telah saling mengenal dikampung tersebut membuat sebuah perserikatan atau perkumpulan. Perkumpulan ini bertujuan untuk mengurus persoalan sehari-hari yang dialami oleh masyarakat setempat. Ketika muncul suatu persoalan, maka mereka berkumpul berembung untuk membahas persoalan tersebut dan mencari jalan keluarnya. Perkumpulan ini dinamakan dengan sinoman. (Sin Tit Po, 20 Maret 1936; 21 Marer 1936). Sinoman dan koperasi meskipun memiliki nama yang berbeda, namun memiliki semangatnya sama yaitu berkumpul bersama untuk menyelesaikan masalah yang dialami.

Sejak Nadjamoeddin memutuskan meninggalkan Surabaya dan pindah ke Makassar, tidak diperoleh data bagaimana kelanjutan dari ke 54 kampung koperasi tersebut. beberapa Koran sejaman yang ditelusuri tidak menampilkan lagi berita terkait dengan kampung koperasi ini. Tahun 1938 Nadjamoeddin memutuskan keluar dari organisasi yang sudah membesarkannya yaitu Parindra. Terkait kepindahan Nadjamoeddin ke Makassar, disampaikan dalam kegiatan *Openbare Protest Meeting* (Pemberita Makassar, Selasa 25 Oktober 1938). Tidak diperoleh data terkait alasan keluarnya, tapi patut diduga bahwa mungkin Nadjamoeddin melakukan protes terkait dengan kebijakan Parindra. Pertimbangan lain yang memungkinkan menjadi alasan kepindahannya adalah mengingat bahwa aktifitas Nadjamoeddin dalam mengembangkan ekonomi rakyat bumiputera tetap berlanjut setelah di di Makassar, boleh jadi keluarnya dari Parindra dan alasan meninggalkan Surabaya di tahun 1938 karena ingin mengembangkan Sulawesi Selatan khususnya dalam bidang perekonomian yang masih sangat tertinggal dari pulau Jawa.

3. Membangun Perekonomian Sulawesi Selatan dengan Membentuk Koperasi

Setelah tiba di Makassar, Nadjamoeddin menyaksikan bahwa fenomena lintah darat tidak hanya ada di Jawa. Makassar sebagai pusat kota di bagian Timur juga tidak luput dari fenomena lintah darat baik Tjina Mindring, Aram Mindring, maupun lintah darat dari orang Eropa dan bumiputera sendiri. Berbekal dari pengalaman membina kampung koperasi di Surabaya, Nadjamoeddin segera membentuk koperasi yang pertama di Makassar. Bersama dengan rekannya yang merupakan tokoh pergerakan di Sulawesi Selatan yaitu Ahmad daeng Siala, Abdul Wahab Daeng Tarru, dan Samsudding daeng Mangngawing mereka bersama-sama membentuk koperasi pertama di Makassar yaitu Koperasi Bank Pasar. Koperasi ini dibentuk pada awal kedatangan Nadjamoeddin di Makassar yaitu pada 5 Agustus 1938. Setidaknya ini bisa menunjukkan bahwa keberadaan Nadjamoeddin di Makassar diterima dengan sangat baik oleh kelompok-kelompok pergerakan di Makassar. Pengalamannya selama di Parindra diaplikasikan di Makassar dalam memajukan perekonomian bumiputera. Koperasi Bank Pasar diawal berdirinya mampu memberikan pinjaman dengan bunga yang jauh lebih ringan dari bunga lintah darat yang berkisar 60-120 % pertahun. Koperasi ini memberikan pinjaman dengan bunga rendah yaitu hanya 20% selama 10 bulan atau 22% pertahun. Umumnya pinjaman yang diberikan, bisa diangsur selama 10 kali angsuran dengan total bunga 20%. Dari 20% tersebut, 5% disediakan untuk premi peminjaman sebagai tabungan dari peminjam dan dibayarkan sekali dalam setahun. Masyarakat juga dilatih menabung dengan cara memotong 5% dari pokok pinjaman tersebut sebagai simpanan. Simpanan ini bisa diambil sewaktu-waktu ketika mereka membutuhkan

(Pemberita Makassar, 8 Agustus 1938). Kehadiran Koperasi bank Pasar ini sangat membantu masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomian bumiputera. Mereka sudah memiliki pilihan yang lebih menguntungkan disbanding meminjam kepada lintah darat dengan bunga yang sangat tinggi.

Setelah Koperasi Bank Pasar sudah berjalan dengan baik, Nadjamoeddin membentuk lagi koperasi yang dinamai Koperasi Minasa Badji. Dalam bahasa Makassar, Minasa Badji ini berarti sebuah pengharapan besar tentang kebaikan. Sebuah harapan baik dari usaha yang sedang dilakukan. Nadjamoeddin sendiri yang menjadi pimpinan dari Minasa Badji. Tidak sama dengan Koperasi Bank Pasar yang dibentuk bersama dengan rekan-rekannya, Minasa Badji hanya memiliki modal yang sedikit disbanding Koperasi Bank Pasar. Nadjamoeddin berusaha mendapatkan suntikan modal dari Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dengan mengajukan proposal bantuan. Pemerintah akhirnya memberikan bantuan berupa subsidi. Dalam sebuah pidato yang disampaikan oleh Nadjamoeddin pada saat rapat umum Partai Celebes Selatan, Nadjamoeddin mengumumkan bahwa Minasa Badji sudah mampu mendapatkan omzet sebesar f 24.000.

Dalam pidato tersebut, Nadjamoeddin menjelaskan pentingnya ikut berkoperasi. Minasa Badji berhasil memberikan pinjaman kepada banyak pedagang kecil sebagai modal usaha. Setiap pedagang kecil diberikan pinjaman lima rupiah untuk menjadi tambahan modal. Pedagang-pedagang tersebut sangat terbantu dengan bantuan pinjaman ini sehingga bisa mengembangkan usahanya dan menggerakkan perekonomian bumiputera. Selain memberikan pinjaman lima rupiah dari Minasa Badji, Nadjamoeddin juga memperjuangkan pedagang kecil tersebut untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah. Tidak diperoleh data yang detail berapa jumlah subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada pedagang kecil.

Semua upaya yang dilakukan Nadjamoeddin Daeng Malewa dalam memajukan perekonomian kerakyatan lewat koperasi baik ketika di Surabaya maupun di Makassar ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bagi rakyat bumiputera. Nadjamoeddin memiliki mimpi besar dalam gagasan perekonomiannya yaitu menciptakan kelas *Middenstand* bumiputera.

KESIMPULAN

Seluruh upaya yang telah dilakukan oleh Nadjamoeddin daeng Malewa bertujuan dalam rangka menciptakan kelas menengah bagi bumiputera. Upaya ini tidak hanya dilakukan olehnya ketika periode kolonial. Bahkan setelah Indonesia dinyatakan sudah Merdeka pada 17 Agustus 1945, Nadjamoeddin tetap konsen dalam memajukan perekonomian masyarakat. Memiliki orangtua yang berprofesi sebagai pedagang tentulah memberikan pengaruh besar dalam cara berpikir seorang Nadjamoeddin. Dibesarkan dalam lingkungan keluarga pedagang, H.A. Rahim membesarkan anak-anaknya dengan didikan yang keras. H.A. Rahim adalah pedagang yang berasal dari Bugis-Makassar yang merantau ke Buton. Di Buton dikenal dengan sebutan Kapitang Bone.

Nadjamoeddin adalah sosok yang mampu menentukan pilihan-pilihan politiknya, meskipun pilihan politik yang dipilihnya bukanlah pilihan yang mainstream dan berseberangan dengan pilihan politik kebanyakan. Apapun pilihan politik seseorang, memiliki konsekuensi politik. Dalam konteks inilah, sebuah pilihan atau sikap politik menjadi sangat menentukan posisi seseorang. Boleh jadi ketika pilihan politik itu sama dengan pilihan kebanyakan pada masa itu, tidak tertutup kemungkinan gagasan-gagasan Nadjamoeddin dalam memajukan ekonomi bumiputera bisa disejajarkan dengan gagasan-gagasan dari tokoh besar seperti Sukarno, Hatta

atau Sahrir dimana mereka akan dikenang sebagai tokoh besar. Akan menjadi berbeda ketika pilihan politik itu berseberangan dengan pilihan kebanyakan, seperti sikap politik Nadjamoeddin yang memilih berbeda dengan yang lainnya kemudian seringkali mendapatkan stigmatisasi sebagai seorang penghianat. Ini hanyalah persoalan pilihan arah pergerakan dan sikap politik untuk mensejahterakan seluruh rakyat, dan seharusnya perbedaan itu dapat dimaknai sebagai kewajaran.

DAFTAR REFERENSI

- Bambang Purwanto, (2006). *Gagalnya Historiografi Indonesia?*, Yogyakarta: Ombak
- Cheong, Yong Mum. (1982). *H. J. Van Mook and Indonesian Independence: A Study of His Role In Dutch-Indonesia Relation 1945-1948*.
- Dick, H. W. (1990). *Industri Pelayaran Indonesia Kompetisi dan Regulasi*, Jakarta. Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. Jakarta: LP3ES.
- Kementerian Penerangan Republik Indonesia, (1953). *Provinsi Sulawesi, Makassar: Djawatan Penerangan Republik Indonesia*.
- Kuntowijoyo, (2003). *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Arsip dan Koran**
- Arsip Secretariaat Denpasar-Conferentie Uitgave No.9, *Hiermede Vervalt Uitgave 45, Defenitief Lijst van Deelnemers en Administratief en Technisch Personeel, aanwezig ter Denpasar-Conferentie*, 8 Desember 1946.
- Barisan Kita, No.1, Maret 1931.
- Pemberita Makassar, Sabtu 24 Mei 1941
- Pemberita Makassar, 8 Agustus 1938
- Pemberita Makassar, Selasa 25 Oktober 1938
- Sin Tit Po, 16 Januari 1936
- Sin Tit Po, 6 Pebruari 1936
- Sin Tit Po, 20 Maret 1936
- Sin Tit Po, 21 Maret 1936
- Soerabaiasch Handelsblad, Terugblijk, 1935.